



**RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2025**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LUWU TIMUR**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 yang merupakan bentuk pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.

Proses Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 didasarkan pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021-2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam Renstra dan RKPD. Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta sejalan dengan visi pembangunan melalui program dan kegiatan untuk mengurangi kesenjangan dan kemiskinan melalui Pembangunan di perdesaan. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini diharapkan dapat digunakan sebagai arah dan pedoman bagi penyusunan dan pelaksanaan berbagai strategi, program dan kegiatan tahunan.

Besar harapan kami, Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 dapat bermanfaat.

Malili, Juni 2024

KEPALA DPMD



HALSEN, S.IP, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19720424 199203 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
 BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
 BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN LALU.....	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 tahun lalu dan Capaian Renstra DPMD Kabupaten Luwu Timur	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMD.....	18
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMD.....	35
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	36
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	42
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	44
3.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional/Propinsi	44
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPMD	46
3.3 Program dan Kegiatan	47
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	78
 BAB V PENUTUP.....	82

DAFTAR TABEL T-C

Tabel TC.29	:	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	9
Tabel TC.30	:	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
Tabel TC.31	:	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024	38
Tabel TC.32	:	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan sinergitas dan akselerasi pencapaian tujuan (common, goals) dan pembangunan yang telah dirumuskan bersama dan menjadi komitmen semua pihak maka setiap SKPD harus menyusun Rencana Kerja, yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang sah dan harus dilaksanakan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah SKPD untuk periode 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sebagai dokumen perencanaan pembangunan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja SKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan pembangunan daerah dan kedudukan yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah dan kedudukan yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, yaitu :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program yang ditetapkan dalam Renstra SKPD sesuai arahan operasional dalam RKPD.
2. Renja SKPD merupakan acuan untuk memasukkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam RKA-SKPD.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Renja DPMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 dan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun 2023. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Renja DPMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 disusun dan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 dengan agenda menyelesaikan rencana pembangunan jangka menengah (Renstra DPMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 dan menyelesaikan permasalahan yang akan dihadapi pada Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 berdasarkan pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana kerja Pemerintah daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan

Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1781);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja merupakan faktor penting dalam pencapaian kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, di dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 menetapkan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan

pengawasan Pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi Masyarakat serta sebagai salah satu acuan dalam penyusunan RKA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur, yaitu :

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada Renstra 2021-2026;
- b. Dokumen perencanaan tahunan dan sarana pengendalian program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025, disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan, yang berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan , dan Sistematika Penulisan.
- Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, yang berisi Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMD Tahun Lalu dan Capaian Renstra DPMD Kabupaten Luwu Timur, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMD Kabupaten Luwu Timur, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
- BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, yang berisi Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, serta Program dan Kegiatan.
- BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, yang berisi rencana kerja yang telah dirumuskan berdasarkan analisis kebutuhan serta

pendanaan yang dibutuhkan.

BAB IV Penutup, yang berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindaklanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan-Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ditegaskan bahwa setiap perencanaan pembangunan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya.

Evaluasi Pelaksanaan renja DPMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2024 dengan mengacu pada APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025. RKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 merupakan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 dan realisasi Renstra DPMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan realisasi APBD untuk DPMD Kabupaten Luwu Timur, dengan pokok-pokok materi yang disajikan, antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra DPMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja DPMD Kabupaten Luwu Timur tahun 2024 dapat dilihat hampir semua program/kegiatan terealisasi dengan baik dan memenuhi target kinerja hasil/keluaran sesuai dengan yang direncanakan. Demikian dengan pencapaian target kinerja program/kegiatan Rentsra DPMD Tahun 2021-2026. Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2025 diperlukan evaluasi capaian tahun sebelumnya. Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 s.d tahun berjalan (*) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel.1 (TC.29)
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D 2024
KABUPATEN LUWU TIMUR

SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target Capaian kinerja Program (Renstra SKPD Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran kegiatan s.d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program Renja SKPD dan Pencapaian RENSTRA sd Tahun 2023 Kabupaten Luwu Timur			Target Program/Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan 2024 (tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Target Renstra SKPD sd Tahun berjalan 2024 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar			100%	96,29%					
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaa, Penganggaran, dan Evaluasi Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%		100%			

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	6	600	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	6	600	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	2	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	3 Dokumen	6	600	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah	10	10	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	10 Dokumen	30	3000	
	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggaraan dengan baik	100	100	100%	100%	100%	100%	300	30000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22	16 orang	16 orang	16 Orang	100%	17 orang	65	6500	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/se mesteran SKPD dan Laporan koordinasi Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/se mesteran	18	18	18 Dokumen	18 Dokumen	100%	18 Dokumen	52	5200	

4	2	1	2.	07	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300	30000	
			03														
4	2	1	2.		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	100%	100%	4 Laporan	12	1200	
			03														
4					Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	100%	93%	93%	100%	100%	300	30000		
4					Pengadaan Pakaiannya Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaiannya Dinas beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	0	0	0	0	0%	0	0	0	#DIV/0!		
4					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	100%	12 Dokumen	12	1200		
4					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6	12 orang	10 orang	10 orang	100%	100%	5 Orang	65	6500		
					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	6	5 orang	5 orang	4 orang			5 Orang				

4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100%	100%	100%	100%	100	300	30000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	18	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	100%	6 Paket	27	2700	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22	15 buah	14 Buah	14 Buah	100%	3 Paket	15	1500	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik yang Disediakan	16	16 jenis	26 Jenis	26 Jenis	100%	28 Paket	6	600	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	3 jenis	4 Jenis	4 Jenis	100%	4 Paket	6	600	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	124 Eksp	132 Eksp	132 Eksp	100%	132 Dokumen	6659	665900	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	50	53 orang	33 orang	33 orang	100%	11 laporan	2650	278947,3684	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	364	292 kali	301 ok	301 ok	86%	256 Laporan	333	38796,1165	

			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara	100%	100%	100%	98%	98%	100%	2,9758	304,96	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	13	13 unit	14 unit	12 unit		16 Unit	33	3300	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	37	14 unit	42 unit	42 unit		30 Unit	560	63712,57485	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Rehabilitasi	2	2 gedung	3 bangunan	3 bangunan		3 Unit			
			PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang Baik Penataan Wilayah Desanya	90		75%	87,32%		80%			
4	2	1	2.	10	Penyelenggaraan Penataan Desa								
			09		Persentase peningkatan penataan desa	85		100%	0,00%	100%			
					Jumlah Desa yang Melakukan pembangunan, penghapusan, penggabungan dan perubahan Status Desa	100	1 desa	10 desa	0 desa	1 Desa			

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Keberadaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 63 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Untuk mencapai kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur, maka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Luwu Timur.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur belum memiliki indikator kinerja yang sudah ditentukan oleh SPM, maka capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur hanya diukur berdasarkan indikator yang sudah ditentukan dalam Renstra DPMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 dan RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Adapun indikator kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut :

1. Persentase Desa Mandiri
2. Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa yang baik
3. Rata-rata jumlah kelompok Bina Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
4. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK
5. Persentase LPM Berprestasi
6. Persentase PKK Aktif
7. Persentase Posyandu Aktif

Pelaksanaan program dan kegiatan berdampak nyata terhadap pencapaian kinerja tersebut diatas, hal ini didukung dengan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Sulawesi Selatan dan APBD Kabupaten Luwu Timur. Secara umum pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur telah sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

Analisis terhadap capaian kinerja pelayanan OPD dilakukan berdasarkan indikator yang sudah ditentukan Indikator Kinerja Kunci (IKK) maupun terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU). Analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Luwu Timur

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+2)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+2)	
1	Persentase meningkatnya desa mandiri	-	-	8,87%	10,48%	12,10%	13,71%	19,20%	29,60%	29,60%	29,60%	
2	Persentase pengentasan desa tertinggal	-						100%	100%	100%	100%	
3	Cakupan prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	-						125	125	125	125	
4	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	-						135	135	135	135	
5	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	-						375	370	370	370	
6	Persentase Berprestasi LPM	-						20	20	20	20	
7	Persentase PKK aktif	-						140	140	140	140	
8	Persentase Posyandu aktif	-						274	274	274	274	

- ✚ Capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut :

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian sasaran strategis dan sasaran program. Dalam menyimpulkan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan mengukur dan menganalisa capaian indikator *outcome*. Analisis capaian sasaran program juga dilakukan terhadap indikator kinerja utama. Analisis juga dilakukan terhadap indikator kinerja yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja, namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran program. Analisis efisiensi penggunaan input berupa sumber daya keuangan dan manusia dilakukan terhadap tiap indikator kinerja dengan cara membandingkan capaian indikator kinerja dengan capaian penggunaan sumber daya. Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi daripada capaian penggunaan sumber daya. Analisis efisiensi dilakukan secara terpisah antara sumber daya keuangan dan sumber daya manusia.

SASARAN STRATEGIS 1

"Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa

Tabel 1
Target dan Realisasi Kinerja sasaran ke 1

Sasaran I :	Meningkatnya kualitas pembangunan desa		
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Meningkatnya Desa Mandiri	8,87%	19,20%	216,46%

1. Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2023

- ❖ Persentase Meningkatnya Desa Mandiri

Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut : "**Jumlah Desa Mandiri dibagi jumlah desa dikali 100 %**"

Indikator sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu

Timur adalah Presentase Meningkatnya Desa Mandiri dengan target tahun 2023 adalah 8,87% dan realisasi 19,20% dengan persentase capaian kinerja 216,46% dari target yang telah ditetapkan. Capaian target tersebut diperoleh dari pengisian kuesioner Indeks Desa Membangun Tahun 2023, setiap indikator memiliki skor. Nilai skor yaitu 0 – 5, Penetapan skor berdasarkan hasil FGD *Analitycal Hierarchy Process* (AHP). Perhitungan indeks pada setiap dimensi dilakukan dengan metode skoring yang kemudian ditransformasikan menjadi sebuah indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Lingkungan dan Indeks Ketahanan Ekonomi. Pengambilan data dari seluruh desa dengan mendapatkan gabungan secara keseluruhan terhadap status desa dan perkembangan desa.

Klasifikasi Status Desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut :

- 1) Desa Sangat Tertinggal : $IDM \leq 0,4907$
- 2) Desa Tertinggal : $0,4907 < IDM \leq 0,5989$
- 3) Desa Berkembang : $0,5989 < IDM \leq 0,7072$
- 4) Desa Maju : $0,7072 < IDM \leq 0,8155$
- 5) Desa Mandiri : $IDM > 0,8155$

Klasifikasi terhadap status desa tersebut bertujuan untuk penetapan status perkembangan dan rekomendasi terhadap intervensi kebijakan yang perlu dilakukan. Pemutakhiran Data Status Perkembangan Desa melibatkan beberapa pihak dari Satker Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bapelitbangda, Kepala Desa serta Tenaga Pendamping Profesional baik dari Tenaga Ahli Pendamping Provinsi (TA Provinsi), Tenaga Ahli Pendamping Kabupaten (TA Kabupaten), Pendamping Desa Kecamatan (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD).

Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun (IDM) dilaksanakan pada tanggal 1 April s.d 30 Juni Tahun 2023 pada website <https://idm.kemendesa.go.id>

Adapun hasil Persentase Meningkatnya Desa Mandiri yaitu 19.20% atau sebanyak 24 desa meningkat statusnya menjadi mandiri, sebagai berikut :

Tabel 1.
Desa yang mengalami Peningkatan Status menjadi Mandiri
Di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

No	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	NILAI IDM 2023	STATUS IDM 2023
1	MANGKUTANA	WONOREJO	0.8781	MANDIRI
2	MANGKUTANA	WONOREJO TIMUR	0.884	MANDIRI
3	NUHA	NIKKEL	0.8343	MANDIRI
4	NUHA	SOROWAKO	0.8381	MANDIRI
5	TOWUTI	TIMAMPU	0.8508	MANDIRI
6	TOWUTI	WAWONDULA	0.9144	MANDIRI
7	TOWUTI	LANGKEA RAYA	0.8256	MANDIRI
8	TOWUTI	BARUGA	0.924	MANDIRI
9	TOWUTI	ASULI	0.8221	MANDIRI
10	MALILI	LASKAP	0.8492	MANDIRI
11	MALILI	MANURUNG	0.8229	MANDIRI
12	MALILI	BARUGA	0.8673	MANDIRI
13	MALILI	LAKAWALI	0.9105	MANDIRI
14	MALILI	BALANTANG	0.8378	MANDIRI
15	MALILI	PUNCAK INDAH	0.9381	MANDIRI
16	MALILI	LAKAWALI PANTAI	0.839	MANDIRI
17	WOTU	BAWALIPU	0.8786	MANDIRI
18	BURAU	BURAU	0.834	MANDIRI
19	BURAU	JALAJJA	0.8432	MANDIRI
20	TOMONI	MULYASRI	0.8189	MANDIRI
21	TOMONI	BERINGIN JAYA	0.8219	MANDIRI
22	TOMONI	BANGUN JAYA	0.8283	MANDIRI
23	TOMONI	MANDIRI	0.9014	MANDIRI
24	KALAENA	KALAENA KIRI	0.933	MANDIRI

- ❖ Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Presentase Meningkatnya Desa Mandiri, yaitu :
 - Program Penataan Desa
 - 1. Penyelenggaraan Penataan Desa
 - Program Administrasi Pemerintahan Desa
 - 1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 - Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan

Masyarakat Hukum Adat

1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

➤ Hambatan/Kendala

Dalam pencapaian indikator Presentase Meningkatnya Desa mandiri, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- Kurangnya partisipasi stakeholder dalam pembangunan desa dalam upaya mendukung desa dalam pemenuhan tolak ukur variabel Indeks Desa Membangun (IDM).
- Kurangnya SDM Pemerintah Desa dalam pemenuhan variabel IDM yang diperlukan

➤ Solusi

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan beberapa solusi yaitu :

- Melakukan sosialisasi terkait Indeks Desa Membangun (IDM)
- Melakukan peningkatan kapasitas dan pendampingan kepada Pemerintah Desa dalam pemenuhan variabel IDM

➤ Efisiensi Sumber Daya

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur dalam rangka mencapai tujuan berupaya efisiensi dalam melakukan kegiatannya. Sumber daya yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Efisiensi adalah ukuran Tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya maka prosesnya dikatakan semakin efisien.

Dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, maka dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.959.972.390,- dari total anggaran yang dialokasikan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 (tidak termasuk gaji dan tunjangan) untuk mencapai target indikator kinerja **Presentase Meningkatnya Desa Mandiri**, terealisasi sebesar Rp. 1.802.341.072,-, sehingga efisiensi anggarannya menggunakan rumus adalah :

$$= 100\% - \left\{ \frac{\text{Jumlah Realisasi Anggaran}}{\text{Jumlah Alokasi Anggaran}} \right\} \times 100\%$$

$$= 100\% - \frac{1.802.341.072}{1.959.972.390} \times 100\%$$

$$= 100\% - 91.96\%$$

$$= \mathbf{8.04\% \text{ Efisiensi Anggaran}}$$

❖ Analisis Efisiensi Sumber Daya

Tabel
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Presentase meningkatnya desa mandiri	8.87	19.20	216.46%	1.959.972.390	1.802.341.072	91.96 %
Program Penataan Desa	Persentase peningkatan penataan desa	75%	87.32%	116%	44.873.160,-	41.429.647,-	92,33 %
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan desa	75%	80%	107%	791.552.400,-	740.278.715,-	93,52 %

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase peningkatan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan lembaga masyarakat, lembaga ekonomi dan pemanfaatan teknologi tepat guna	65%	80.65%	124%	1.123.546.830,-	1.020.632.710,-	83,95 %
--	--	-----	--------	------	-----------------	-----------------	---------

Tabel
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi Biaya
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Persentase meningkatnya desa mandiri	116%	91,96%	79.28%

Pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa sebesar 116% dengan penyerapan anggaran sebesar 91.96%, sehingga persentase efisiensi biaya adalah 79.28%. Adapun Persentase efisiensi biaya dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Persentase efiesinesi biaya} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right]$$

Ada beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian indikator sasaran tersebut yaitu :

- Adanya data base perkembangan status desa pada tahun 2023 yang dimuktahirkan setiap tahun.
- Adanya Berita Acara Penetapan Status Desa yang ditanda tangani oleh Kepala

Dinas PMD, Kepala Bapelitbangda dan Koordinator Tenaga Ahli Kabupaten.

- Adanya supporting data dari OPD terkait
- Pelaksanaan FGD terkait Penilaian IDM Kabupaten Luwu Timur

2. Perbandingan antara target dan realisasi dengan tahun sebelumnya

Tabel
Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran I :	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa									Target Tahun 2026
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Presentase meningkatnya desa mandiri	5.65	5.69	100,7 %	7.26	8.06	111.01 %	8.87	19.20	216,46 %	13,71

Pengukuran kinerja dari tahun 2021-2023 menunjukkan peningkatan kinerja Presentase Meningkatnya Desa Mandiri dapat dilihat dari tabel diatas. Pada tahun 2021 realisasi 5.69% atau 7 desa meningkat statusnya menjadi mandiri, 2022 diperoleh realisasi 8.06% atau 10 desa mandiri dari target 8.87% atau 11 desa meningkat statusnya menjadi mandiri sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 90.07%. Dan pada Tahun 2023 terjadi peningkatan dari target 8.06% atau 10 desa meningkat statusnya menjadi mandiri menjadi 19.20% atau 24 desa mandiri dimana skoring desa IDM tertinggi 0,93381 desa Puncak Indah Kecamatan Malili dan skoring desa IDM yang terendah 0,8189 Desa Mulyasari Kecamatan Tomoni.

Peningkatan ini merupakan indikasi positif dimana semakin banyak desa statusnya meningkat.

3. Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

Berdasarkan realisasi tahun 2023 jika dibandingkan dengan target yang direncanakan sampai dengan tahun 2026, sudah melebihi target. Adapun perbandingan target dan capaian pada tahun 2023 dengan target jangka menengah pada Renstra DPMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Jangka Menengah
(2021 – 2026)

Sasaran I :	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa			Target Akhir Renstra 2026	% Capaian s/d 2023 terhadap target akhir Renstra 2026
Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi				
	Tahun 2022	Tahun 2023	rata-rata realisasi sampai dengan tahun 2023		
Presentase Meningkatnya Desa Mandiri	8.06	19.20	19.20	13.71	140%

4. Perbandingan dengan Target Nasional

Salah satu cara untuk mengetahui Tingkat keberhasilan kinerja yang telah dicapai adalah dengan membandingkan realisasi kinerja yang telah dicapai dengan realisasi kinerja daerah/instansi lain.

Mengenai perbandingan antara realisasi kinerja Dinas dan Standar Nasional Lainnya, tidak kami dapati indikator pembanding yang setara untuk dilakukan Analisa Perbandingan hanya score penilaian yaitu **Desa Sangat Tertinggal** $IDM \leq 0,4907$, **Desa Tertinggal** $0,4907 < IDM \leq 0,5989$, **Desa Berkembang** $0,5989 < IDM \leq 0,7072$, **Desa Maju** $0,7072 < IDM \leq 0,8155$, **Desa Mandiri** $IDM > 0,8155$.

Namun, melihat pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, dapat disandingkan antara indikator sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 yakni :

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian DPMD Kabupaten Gowa
Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa	Persentase Desa Mandiri	43.80% (53 Desa)	44.63% (54 Desa)	101.89%

5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran

Analisa Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja merupakan penjelasan capaian indikator kinerja dari program-program pendukung sehingga dapat dilakukan identifikasi mana program yang berhasil (capaian sesuai target) dan mana yang belum maksimal (capaian dibawah target). Berdasarkan hal tersebut, akan dilakukan tindak lanjut kepada program-program yang capaian tidak maksimal di tahun-tahun berikutnya.

Tabel
Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Rencana Tindak Lanjut
Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Persentase meningkatnya desa mandiri	216.46%	Penataan Desa	Persentase peningkatan penataan desa	75%	87.32%	116%	Dengan mengacu pada pencapaian tahun 2023, program ini akan tetap dilaksanakan pada tahun 2024
			Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan desa	75%	80%	107%	
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase peningkatan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan lembaga masyarakat, lembaga ekonomi dan pemanfaatan teknologi tepat guna	65%	80.65%	124%	

a) Penjelasan Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sebagai berikut :

- Sasaran strategis 1 : **Meningkatnya kualitas pembangunan desa**

Indikator Kinerja Persentase meningkatnya desa mandiri dengan target 8,87% atau 11 desa telah berhasil terealisasi sebesar 19.20% atau 24 desa mandiri, dengan capaian 216,46%.

Adapun Program yang mendukung yaitu Program Penataan Desa, Administrasi

Pemerintahan Desa dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat..

b) Upaya perbaikan pada perencanaan berikutnya :

Beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk perencanaan berikutnya, sebagaimana hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2023 yaitu :

1. Melakukan rapat koordinasi antara Pemerintah Desa dengan stakeholder terkait atas pemenuhan variabel IDM yang masih kurang.
2. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan langsung ke Pemerintahan Desa bersama Tim Pendamping Desa dari Kemendes dalam rangka peningkatan status desa mandiri.

SASARAN STRATEGIS II

"Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa"

Sasaran strategis ini bukan merupakan indikator kinerja utama dengan indikator kinerja Nilai Sakip (n-1), capaian kinerja ini dari indikator kinerja tersebut disajikan pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai Sakip	Nilai	70.38	73.35	104
Rata-rata Capaian Kinerja			104		

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Target kinerja dan realisasi kinerja Nilai SAKIP (n-1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel

Perbandingan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja
Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pada Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai SAKIP (n-1)	Nilai	70.38	73.35	104

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan beberapa tahun terakhir atau 5 Tahun berturut-turut (2019-2023)

Capaian Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur selama 5 (lima) Tahun (2019-2023), disajikan pada tabel berikut :

Tabel
Nilai dan Kategori SAKIP
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Kategori	Capaian Kinerja
Nilai SAKIP	Nilai	2019	60.00	65.58	B	109,30
		2020	65.00	65.58	B	101.01
		2021	70.28	70.16	BB	99.83
		2022	70.35	73.35	BB	104
		2023	71.00	73.35*	BB	103

3. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target RPJMD/ Renstra (2021-2026)

Capaian Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur dibandingkan Target Jangka Menengah Daerah (RPJMD 2021-2026/Renstra 2021-2026) disajikan pada tabel berikut :

Tabel
Capaian Indikator Kinerja Strategis
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur
Dibandingkan target RPJMD/Renstra 2021-2026

Sasaran Strategis meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
Indikator Kinerja	Target RPJMD/Renstra 2021-2026	Realisasi Tahun 2022	Presentase Capaian Kinerja
Nilai SAKIP	70.35	73.35	104

4. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional/Capaian Daerah Lain

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja yang telah dicapai salah satunya dengan cara membandingkan realisasi kinerja yang telah dicapai dengan realisasi kinerja daerah/instansi lain. Perbandingan antara Tingkat capaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur dengan daerah lain dalam pencapaian Indikator Strategis di Tahun 2023, Dimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan mendapatkan nilai 81.35 dengan predikat A. Nilai SAKIP antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan terdapat selisih nilai sebesar 8. Namun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur harus semakin meningkatkan kinerja sehingga dapat meningkatkan nilai SAKIP dimasa yang akan datang.

Tabel
Perbandingan Nilai SAKIP
DPMD Kab. Gowa Prov. Sulawesi Selatan dengan
DPMD Kab. Luwu Timur Prov. Sulawesi Selatan
Tahun 2023

Nilai SAKIP DPMD Kab. Gowa	Nilai SAKIP DPMD Kab. Luwu Timur	Selisih	Presentase Capaian SAKIP DPMD Kab. Luwu Timur Terhadap SAKIP DPMD Kab. Gowa
81.35	73.35	8	110.90

5. Analisa Penyebab keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang dilakukan

Pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja selama tahun 2023 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi sebagai bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

Adapun keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan OPD

Dalam meningkatkan kualitas perencanaan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, keselarasan antara dokumen perencanaan harus tetap dijaga dan diperhatikan yaitu antara dokumen RPJMD, Renstra, Renja, RKA, DPA dan LAKIP.

2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan akuntabilitas kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

3. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Asset Perangkat Daerah

Pengelolaan asset perangkat daerah dipengaruhi oleh laporan pengelolaan asset yang disusun setiap bulannya.

4. Meningkatnya Kualitas Monitoring dan Pelaporan

Salah satu yang mempengaruhi peningkatan akuntabilitas kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur adalah melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur yang telah dilakukan.

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Indikator kinerja ini di dukung oleh 1 Program, 8 Kegiatan dan 25 sub kegiatan, Dari 100% target kinerja yang ditetapkan terealisasi 97,39%. Adapun Program yang mendukung yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, maka dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.442.509.841 dari total anggaran yang dialokasikan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp. 2.350.934.971,-, sehingga efisiensi anggarannya menggunakan rumus adalah :

$$= 100\% \left\{ \frac{\text{Jumlah Realisasi Anggaran}}{\text{Jumlah Alokasi Anggaran}} \right\} \times 100\%$$

$$= 100\% - \frac{2.350.934.971}{2.442.509.841} \times 100\%$$

= 100% - 96.00%

= **4.00% Efisiensi Anggaran**

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur yakni melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi pembinaan pemerintahan desa, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat selalu dihadapkan dengan permasalahan. Permasalahan umum yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi antara lain :

1. Belum optimalnya pelaksanaan penataan desa yang baik secara keseluruhan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam rangka pemberian pelayanan dan peningkatan keberdayaan masyarakat;
2. Belum optimalnya peran aktif dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan pembangunan, dalam hal ini belum efektivitasnya pelaksanaan fungsi lembaga kemasyarakatan seperti LPM dalam menggerakkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan;
3. Kurang pedulinya masyarakat terhadap fungsi lembaga-lembaga adat di desa;
4. Belum teridentifikasinya Lembaga ekonomi Masyarakat desa;
5. Kurang optimalnya kemampuan Lembaga Ekonomi Masyarakat dalam manajemen;
6. Belum tertib administrasi Pengelolaan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat;
7. Belum meningkatnya usaha potensi ekonomi Desa;
8. Kurangnya SDM pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa dalam memahami petunjuk laporan pencairan hingga pelaporan;

9. Kurangnya SDM yang mumpuni dalam pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan seluruh aset kekayaan Desa.

Berdasarkan permasalahan umum yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, maka dirumuskan strategi yang akan ditempuh pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pengelolaan administrasi pemerintahan desa;
2. Peningkatan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan penguatan lembaga ekonomi desa;
3. Peningkatan kapasitas dan peran kelembagaan desa;
4. Peningkatan kelompok TTG dan pendayagunaan potensi sumber daya alam perdesaan;
5. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang bersangkutan. yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk setiap SKPD yang bersangkutan.

Berdasarkan telaahan terhadap rancangan awal RKPD dan hasil review terhadap

rancangan awal RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 dengan rancangan awal Renja DPMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024, sebagaimana diuraikan pada lampiran 3 (Tabel T-C.31), dapat dikatakan bahwa prioritas program.kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan dan pagu indikatif sudah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan.

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Luwu Timur

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikator	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	BELANJA OPERASI				12.861.302.211	BELANJA OPERASI					
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Kab.Luwu Timur	100%	3.787.838.271	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Kab.Luwu Timur	100%	89.934.550	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	Kab.Luwu Timur	100%	89.934.550	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	Kab.Luwu Timur	100%	89.934.550	
	Penyusunan Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Luwu, Mailli, Puncak Indah	3 Dok	42.299.700	Penyusunan Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Luwu, Mailli, Puncak Indah	3 Dok	42.299.700	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab.Luwu, Mailli, Puncak Indah	2 Dok	3.522.450	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab.Luwu, Mailli, Puncak Indah	2 Dok	3.522.450	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab.Luwu, Mailli, Puncak Indah	2 Dok	3.653.750	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab.Luwu, Mailli, Puncak Indah	2 Dok	3.653.750	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Luwu, Mailli, Puncak Indah	10 Dok	40.458.650	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Luwu, Mailli, Puncak Indah	10 Lap	40.458.650	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselesaikan dengan baik	Kab.Luwu Timur	100%	2.668.897.246	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselesaikan dengan baik	Kab.Luwu Timur	100%	2.666.737.584	
	Pembelian gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kab.Luwu, Mailli, Puncak Indah	17 org	2.610.067.246	Pembelian gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kab.Luwu, Mailli, Puncak Indah	17 org	2.607.907.584	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Trivulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Trivulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulan/Semesteran SKPD	Kab.Luwu, Mailli, Puncak Indah	18 Lap	58.830.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Trivulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Trivulan/Semesteran SKPD	Kab.Luwu, Mailli, Puncak Indah	18 Lap	58.830.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar		100%	24.337.000	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar		100%	27.697.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab.Luwu, Mailli, Puncak Indah	4 Lap	24.337.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab.Luwu, Mailli, Puncak Indah	4 Lap	27.697.000	
	Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah		100%	142.981.075	Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Kab.Luwu, Timur	100%	142.981.075	
	Pengadaan Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakelan dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	Kab.Luwu, Mailli, Puncak Indah	22 org	20.000.000			Kab.Luwu, Mailli, Puncak Indah	37 paket	20.000.000	

	Pendataan dan Pegolahan Administrasi Kepegawain	Jumlah Dokumen Pengolahan Kepegawain	Pendataan dan Administrasi	Kab.Luwu, Timor, Mailli, Puncak Indah	12 Dok	14.999,875	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Kab.Luwu, Timor, Mailli, Puncak Indah	5 org	107.981,200	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	479.709,400	Kab.Luwu, Timor, Mailli, Puncak Indah	100%	478.509,400	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.540,000	Kab.Luwu, Timor, Mailli, Puncak Indah	6 paket	2.540,000	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2.070,000	Kab.Luwu, Timor, Mailli, Puncak Indah	3 paket	2.070,000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10.404,200	Kab.Luwu, Timor, Mailli, Puncak Indah	29 paket	10.404,200	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan pengandaan yang Disediakan	7.015,000	Kab.Luwu, Timor, Mailli, Puncak Indah	4 paket	7.015,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	14.100,000	Kab.Luwu, Timor, Mailli, Puncak Indah	132 dok	14.100,000	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	24.840,000	Kab.Luwu Timor, Senua Kecamatan,Senua Desa	11 Lap	23.640,000	
	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	418.740,200	Senua Kab./Kota, Senua Kecamatan, Senua Kelurahan, Senua Desa	196 Lap	418.740,200	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Unsur Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	59.000,000	Kab.Luwu Timur	100%	59.000,000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Atau Mesin lainnya yang Disediakan	59.000,000	Kab.Luwu, Timor, Mailli, Puncak Indah	3 unit	59.000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Unsur Pemerintah Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	162.069,000	Kab.Luwu, Timor, Mailli, Puncak Indah	100%	162.069,000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.845,000	Kab.Luwu, Timor, Mailli, Puncak Indah	12 Lap	4.845,000	
	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	94.224,000	Kab.Luwu, Timor, Mailli, Puncak Indah	48 Lap	94.224,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	63.000,000	Kab.Luwu, Timor, Mailli, Puncak Indah	3 Lap	63.000,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Unsur Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Unsur Pemerintahan yang terpelihara dengan baik	160.910,000	Kab.Luwu, Timor, Mailli, Puncak Indah	100%	160.910,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Dinas	84.650,000	Kab.Luwu, Timor,	16 unit	84.650,000	

	Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan perizinannya	Malili, Puncak Indah					
		Jumlah Peralatan dan mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab.Luwu, Timur, Malili, Puncak Indah	42 unit	25.260.000	Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan perizinannya	Malili, Puncak Indah
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Rehabilitasi	Kab.Luwu, Timur, Malili, Puncak Indah	3 unit	51.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Rehabilitasi	Kab.Luwu, Timur, Malili, Puncak Indah
	Penataan Desa	Persentase Desa Yang Penataan Wilayah Desanya	Semma Kab./Kota, Semma Kecamatan, Semma Kelurahan, Semma Desa	85%	46.544.500	Penataan Desa	Persentase Desa Yang Penataan Wilayah Desanya	Semma Kab./Kota, Semma Kecamatan, Semma Kelurahan, Semma Desa
	Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Peningkatan Penataan Desa	Semma Kab./Kota, Semma Kecamatan, Semma Kelurahan, Semma Desa	80%	46.544.500	Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Peningkatan Penataan Desa	Semma Kab./Kota, Semma Kecamatan, Semma Kelurahan, Semma Desa
	Perbentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Perbentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	Semma Kab./Kota, Semma Kecamatan, Semma Kelurahan, Semma Desa	1 desa	46.544.500	Perbentukan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Perbentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	Semma Kab./Kota, Semma Kecamatan, Semma Kelurahan, Semma Desa
	Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan desa	Semma Kab./Kota, Semma Kecamatan, Semma Kelurahan, Semma Desa	85%	7.939.612,850	Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan desa	Semma Kab./Kota, Semma Kecamatan, Semma Kelurahan, Semma Desa
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi dan Keuangan Desa	Semma Kab./Kota, Semma Kecamatan, Semma Kelurahan, Semma Desa	100%	7.939.612,850	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi dan Keuangan Desa	Semma Kab./Kota, Semma Kecamatan, Semma Kelurahan, Semma Desa
	Facilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Semma Kab./Kota, Semma Kecamatan, Semma Kelurahan, Semma Desa	2 dok	10.654.200	Facilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Semma Kab./Kota, Semma Kecamatan, Semma Kelurahan, Semma Desa
	Facilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Semma Kab./Kota, Semma Kecamatan, Semma Kelurahan, Semma Desa	5 dok	99.024.450	Facilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Semma Kab./Kota, Semma Kecamatan, Semma Kelurahan, Semma Desa
	Facilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Semma Kab./Kota, Semma Kecamatan, Semma Kelurahan, Semma Desa	125 dok	34.267.450	Facilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Semma Kab./Kota, Semma Kecamatan, Semma Kelurahan, Semma Desa
	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Semma Kab./Kota, Semma Kecamatan, Semma Kelurahan, Semma Desa	125 dok	68.205.750	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Semma Kab./Kota, Semma Kecamatan, Semma Kelurahan, Semma Desa
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Semma Kab./Kota, Semma Kecamatan, Semma Kelurahan, Semma Desa	124 org	170.629.950	Pembinaan Peningkatan Kapasitas aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Semma Kab./Kota, Semma Kecamatan, Semma Kelurahan, Semma Desa
	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Semma Kab./Kota, Semma Kecamatan, Semma Kelurahan, Semma Desa	125 dok	23.734.900	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Semma Kab./Kota, Semma Kecamatan, Semma Kelurahan, Semma Desa
	Penyelenggaraan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Semma Kab./Kota, Semma Kecamatan, Semma Kelurahan, Semma Desa	67 Lap	7.225.306.000	Penyelenggaraan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Semma Kab./Kota, Semma Kecamatan, Semma Kelurahan, Semma Desa
	Facilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Facilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian	Semma Kab./Kota, Semma Kecamatan, Semma Kelurahan, Semma Desa	15 Lap	44.080.600	Facilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Facilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian	Semma Kab./Kota, Semma Kecamatan, Semma Kelurahan, Semma Desa

		Perangkat Desa	Semua Kelurahan, Semua Desa									
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Semua Kab./Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Semua Desa	11 dok	124.999.650	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Semua Kab./Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Semua Desa	11 dok	124.999.650		
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Semua Kab./Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Semua Desa	124 org	138.709.900	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Semua Kab./Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Semua Desa	124 org	138.709.650		
	Pemberdayaan Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase peningkatan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan lembaga ekonomi masyarakat, lembaga ekonomi dan pemanfaatan teknologi tepat guna	Semua Kab./Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Semua Desa	80%	1.087.306.590	Pemberdayaan Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase peningkatan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan lembaga ekonomi masyarakat, lembaga ekonomi dan pemanfaatan teknologi tepat guna	Semua Kab./Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Semua Desa	80%	1.087.306.590		
	Pemberdayaan Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelekunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemberdayaan lembaga masyarakat, lembaga ekonomi desa dalam pembangunan desa	Semua Kab./Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Semua Desa	100%	1.087.306.590	Pemberdayaan Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelekunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemberdayaan lembaga masyarakat, lembaga ekonomi desa dalam pembangunan desa	Semua Kab./Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Semua Desa	100%	1.087.306.590		
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Kemasyarakatan (RT,RW/PKK, Desa/Kelurahan LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan, dan Kelembagaan Kemasyarakatan (RT,RW/PKK, Desa/Kelurahan LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Semua Kab./Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Semua Desa	254 dok	171.359.500	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Kemasyarakatan (RT,RW/PKK, Desa/Kelurahan LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan, dan Kelembagaan Kemasyarakatan (RT,RW/PKK, Desa/Kelurahan LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Semua Kab./Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Semua Desa	254 dok	171.359.500		
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Semua Kab./Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Semua Desa	2 dok	113.380.850	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Semua Kab./Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Semua Desa	2 dok	113.380.8501		
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Semua Kab./Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Semua Desa	11 Lap	115.248.690	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Semua Kab./Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Semua Desa	11 Lap	115.248.690		
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Semua Kab./Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Semua Desa	12 dok	687.317.550	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Semua Kab./Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Semua Desa	12 dok	687.317.550		

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disusun dengan berpedoman pada Renstra dan mengacu pada RKPD yang memuat tentang kebijakan. Program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Usulan program dan kegiatan berasal dari pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, Perusahaan/Instansi Swasta, yang merupakan hasil dari musrenbang desa, musrenbang kecamatan sampai musrenbang kabupaten. Hasil musrenbang tersebut digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan RAPBD Tahun 2024 yang nantinya digunakan sebagai acuan penyusunan rancangan rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur.

Selanjutnya semua usulan program/kegiatan hasil musrenbang tersebut dipilih berdasarkan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Renstra serta isu-isu strategis yang sedang terjadi di masyarakat. Hasil pencermatan usulan musrenbang digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan kerja. Kemudian rancangan renja tersebut dibahas dalam forum SKPD. Tujuan Pembahasan rancangan Renja adalah penyalarsan program dan kegiatan, mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta penyesuaian pendanaan program dan kegiatan berdasarkan pagu indikatif. Dan pada pelaksanaan Musrenbang Tahun 2024, tidak terdapat usulan dari pemangku kepentingan.

Tabel (T-C.32)
Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Luwu Timur

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
		TIDAK ADA			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan kebijakan nasional dan provinsi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur, berpedoman dan mengacu kepada :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Sumber Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
Berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi tersebut, maka dirumuskan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur,

sebagai berikut :

1. Penguatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa
 2. Penguatan kapasitas kelembagaan ekonomi produktif masyarakat dan keluarga termasuk lembaga ekonomi perdesaan
 3. Penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa
 4. Pendayagunaan teknologi tepat guna
 5. Penguatan kualitas manajemen dan dukungan pelayanan teknis lainnya di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur
- Olehnya itu sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2024 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan yaitu :
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
 2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
 3. **Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;**
 4. Renovasi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
 6. Membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 sampai dengan 5 tahun ke depan. Terkait dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, tujuannya adalah "**Meningkatnya Kemandirian Pembangunan Desa**". Adapun sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai atau

dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya yang tersedia dalam kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur. Dengan demikian ditetapkan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur yaitu :

1. Meningkatkan Kemandirian Pembangunan Desa
2. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan Perangkat Daerah

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Sasaran di dalam Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 adalah :

1. Meningkatnya kualitas pembangunan desa
2. Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Lingkungan Masyarakat Desa
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel
Tujuan dan Sasaran Renja DPMD Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target Kinerja
1	Meningkatkan kemandirian pembangunan desa	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Persentase meningkatnya desa mandiri	
2.	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Nilai SAKIP	73

3.3 Program dan Kegiatan

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya serta mengakomodir usulan masyarakat dan pemangku kepentingan

dalam rangka mewujudkan sasaran yang telah direncanakan, maka pada tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur merencanakan 3 program utama dengan 4 kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan 1 program pendukung dengan 11 kegiatan yang menunjang tugas kesekretariatan agar fungsi organisasi dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Adapun program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

3.1.1 Program Utama

1. Program Penataan Desa
 - a. Penyelenggaraan Penataan Desa
 - Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa
2. Program Administrasi Pemerintahan Desa
 - a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa
 - Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa
 - Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
 - Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
 - Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
 - a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
- Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
- Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MALU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA														
2		URUSAN PEMERINTAHAN WALIYAH YANG TIDAK BERTAKUT DENGAN DEWASMAN DASAR						12.861.302.211,00							0,00	
2.13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						12.861.302.211,00							0,00	

1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOT A	-	-	-	3,787,838,271.00	-	-	-	0.00		
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Parangkat Daerah	-	0 %	-	89,934,550.00	-	04. Penting k akan Keseja Kesejahteraan masyarakat at yang berkualitas s dan merata 3) Meningk atkan Kem Kesejahteraan Daerah Dalam Menduku ng Kemajuan Pembangu nan Daerah	-	100 %	0.00	DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
	01											

		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen			2 Dokumen	42.299.700.00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	04 Pening kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan merata 3) Meningkatkan kehidupan masyarakat dalam Desa Melalui Kemajuan Pembangunan Daerah	-	3 Dokumen	0.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.00 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
		Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Prestasi Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	3.622.450.00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	04 Pening kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan merata 3) Meningkatkan kehidupan masyarakat dalam Desa Melalui Kemajuan Pembangunan Daerah	-	2 Dokumen	0.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.00 04	Koordinasi dan Penyusunan DFA-SKPD													

[illegible]

		Jumlah Paket Pakasan Dinas beserta Attribut Keleengkapan	46 Paket					37 Paket	20.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Mallit, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Pening k atian Keseja hiteran masyarak at yang berkualita s dan merata 3) Meningk atkan Kem andrian Desa Dalam Menduku ng kemajua an Pembang u nan Daerah	-	46 Paket	0,00	DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN DESA	
2.13.01.2.05.00 03		Pembelian dan Pengadaan Administrasi Kepegawaian																
		Jumlah Dokumen Pengadaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen					12 Dokumen	14.999.875,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Pening k atian Keseja hiteran masyarak at yang berkualita s dan merata 3) Meningk atkan Kem andrian Desa Dalam Menduku ng kemajua an Pembang u nan Daerah	-	12 Dokumen	0,00	DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN DESA	
2.13.01.2.05.00 11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																

			Jumlah Orang yang Membantu Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	6 Orang					5 Orang		107.981.200.00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Pening k. atan Keseja iteraan masyrak at Pening berkualita s dan merita.3)	-	6 Orang	0.00	DINAS PEMBERDAYA AN MASTARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 %					-		479.709.400.00			-	04. Pening k. atan Keseja iteraan masyrak at Pening berkualita s dan merita.3)	-	100 %	0.00	DINAS PEMBERDAYA AN MASTARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	

		Jumlah Paket Barang Logistik Kantor yang Disediakan	16 Paket				29 Paket	10,404,200.00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Pening k at an Keseja Keseja masyarak at yang berkualita s dan merata 3) Meningk atkan Kem andrian dalam Daerah Menduku ng Kemajuan Pembang u nan Daerah	-	16 Paket	0.00	DINAS PEMBERDAYA MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.06.00 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan															
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket				4 Paket	7,015,000.00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Pening k at an Keseja Keseja masyarak at yang berkualita s dan merata3) Meningk atkan Kem andrian Daerah Menduku ng Kemajuan Pembang u nan Daerah	-	4 Paket	0.00	DINAS PEMBERDAYA MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.06.00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															

		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disebarkan	60 Dokumen					132 Dokumen	14.100.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kai/Desa Kab. Luwu Timur, Maili, Semua Kai/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Pening k atian Kesega nteraan masyrak at yang berkualita s dan merata 3) Meningk atkan Kem andrian Desa Dalam Menduku ng Kemajuan Pembang u ran Daerah	-	60 Dokumen	0.00	DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.06.00 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu																
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu							11 Laporan	24.840.000,00	Kab. Luwu Timur, Maili, Semua Kai/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Pening k atian Kesega nteraan masyrak at yang berkualita s dan merata 3) Meningk atkan Kem andrian Desa Dalam Menduku ng Kemajuan Pembang u ran Daerah	-		0.00	DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD																

		Jumlah Laporan Penyusunan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	364 Laporan			283 Laporan	418,740,200.00	Kab. Luwu Timur, Malli, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Pening k atian Kesep 히려an masyarakat at yang sejahtera sebagai merata 3) Meningk atkan Kem andrian Desa Dalam Merduku ng Kenajalan Pening u nan Daerah	-	364 Laporan	0.00	DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.012.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintah Daerah	-	0 %		-	59,000,000.00			-	04. Pening k atian Kesep 히려an masyarakat at yang sejahtera sebagai merata3) Meningk atkan Kem andrian Desa Dalam Merduku ng Kenajalan Pening u nan Daerah	-	100 %	0.00	DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.012.07.00	Pengadaan Mebel													

			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit					1 Unit		0.00	Kab. Lumu Timur, Malili, Sempu Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Penting k at an Keseja heraan masyarakat kepada berkualita s dan merata 3) Meningk atkan Kem andrian Desa Menduku ng u Kemajuan Pembang u nan Daerah	-	1 Unit	0.00	DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penjangk Unsan Pemerintahan Daerah	-	0 %						-	162,089,000.00				-	04. Penting k at an Keseja heraan masyarakat kepada berkualita s dan merata3) Meningk atkan Kem andrian Desa Menduku Kemajuan Pembang u nan Daerah	-	100 %	0.00	DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.08.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
01																			

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Keperawatan Disediaan	4 Laporan	4 Laporan	63.000.000,00	Kab. Lumu Tujur Muli, Santia Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	04 Pening k atun Kesej nteraan masyrak at yang berkualita s dan merata 3) Meningk nteraan Kem andrian Desa Dalam Menduku ng Kemajuan Pembang u nan Daerah	-	4 Laporan	0,00	DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN DESA
2.1301.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penjang Utara Pemerintahan Daerah	-	0 %	-	160.910.000,00			-	04 Pening k atun Kesej nteraan masyrak at yang berkualita s dan merata3) Meningk nteraan Kem andrian Desa Dalam Menduku ng Kemajuan Pembang u nan Daerah	-	100 %	0,00	DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN DESA
2.1301.2.09.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
02													

		Unitas Kendaraan Dinas Operasional Dinas Pemeliharaan Dinas yang Dipekerjakan dan dibayar dari Pajak dan Perizinannya	13 Unit		16 Unit	84.650.000,00	Kab. Luwu, Tana Malili, Semua KelDesa	PENDAPAT AN ASU DAERAH (PAD)	-	04. Pening kapan keaja iteraan masyrak at yang berkualita s dan merata 3) Meningk akan ken andrian Desa Dalam Menduku ng Kemajuan Pembang u nrai Daerah	-	13 Unit	0,00	DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN DESA
	2.1301.2.09.00	Pemeliharaan Perabotan dan Mesin Lainnya												
	06													
		Unitas Perabotan dan Mesin Lainnya yang Diperbaiki	37 Unit		42 Unit	25.280.000,00	Kab. Luwu Tana Malili, Semua KelDesa	PENDAPAT AN ASU DAERAH (PAD)	-	04. Pening kapan keaja iteraan masyrak at yang berkualita s dan merata 3) Meningk akan ken andrian Desa Dalam Menduku ng Kemajuan Pembang u nrai Daerah	-	37 Unit	0,00	DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN DESA
	2.1301.2.09.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
	09													

		Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	1 Desa				1 Desa	46,544,500.00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	1 Desa	0.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3.	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	7,939,612,890.00				04. Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	-	0.00	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Penguatan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	100 persen				-	7,939,612,890.00			-	04. Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	-	100 persen	0.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.00	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa														

		Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	2 Dokumen			2 Dokumen	10,654,200.00	Kab. Luwu Ttnur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	04 Pening k ataan Keseja iteraan masyrak at yang berkualita s dan merata 3) Meningg atkan Kem andrian Desa Dalam Meroduku Kemajuan Pembang u ran Daerah	-	2 Dokumen	0.00	DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.00 02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa														
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	5 Dokumen			5 Dokumen	99,024,450.00	Kab. Luwu Ttnur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	04 Pening k ataan Keseja iteraan masyrak at yang berkualita s dan merata 3) Meningg atkan Kem andrian Desa Dalam Meroduku Kemajuan Pembang u ran Daerah	-	5 Dokumen	0.00	DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.00 03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa														

		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas: Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	125 Dokumen	125 Dokumen	34,267,450.00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Pening k atan Keseja hteraan masyrak at yang berkualita s dan merata 3) Meningk atkan Kem andrian Desa Dalam Menduku ng Kemajuan Pembangu n nan Daerah	-	125 Dokumen	0.00	DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN DESA	
2.13.04.2.01.00 04		Fasilitas Pengembangan Keuangan Desa												
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas: Pengembangan Keuangan Desa	124 Dokumen	125 Dokumen	68,205,750.00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Luwu, Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Pening k atan Keseja hteraan masyrak at yang berkualita s dan merata 3) Meningk atkan Kem andrian Desa Dalam Menduku ng Kemajuan Pembangu n nan Daerah	-	124 Dokumen	0.00	DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN DESA	
2.13.04.2.01.00 05		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa												

		Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Penguasaan Kapasitas	2 Orang					124 Orang	170.629.900,00	Kab. Luwu Timur, Sempu Kecamatan, Sempu KelDesa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	04 Peningkatan Kesepa masyarakat yang berkualitas dan merata.3) Meningkatkan andrian Desa Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	-	2 Orang	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.00	07	Evaluasi dan Penguasaan Peraturan Desa															
		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Penguasaan Peraturan Desa	124Dokumen					125Dokumen	23.734.900,00	Kab. Luwu Timur, Sempu Kecamatan, Sempu KelDesa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	04 Peningkatan Kesepa masyarakat yang berkualitas dan merata.3) Meningkatkan andrian Desa Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	-	124Dokumen	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.00	09	Penyeleenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa															

		Jumlah Laporan Hasil Penyenggaraan Pemilihan, Pengungkapan dan Pembentukan Kepala Desa	0 Laporan			67 Laporan	7.225.306.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Pening k atian Kesega meraan masarak at yang berkualita s dan merata 3) Meningg atkan Kem andrian Desa Dusun Menduku ng Kemajuan Pembang uan Daerah	-	0 Laporan	0,00	DINAS PEMERDA YA AN SYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.00 10	Fasilitasi Pengungkapan dan Pemberitahuan Perangkat Desa														
		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengungkapan dan Pemberitahuan Perangkat Desa	16 Laporan			15 Laporan	44.080.600,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Pening k atian Kesega meraan masarak at yang berkualita s dan merata 3) Meningg atkan Kem andrian Desa Dusun Menduku ng Kemajuan Pembang uan Daerah	-	16 Laporan	0,00	DINAS PEMERDA YA AN SYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.00 11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa														

[illegible]

		Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Penguasaan Kebutuhan Lembaga Kemasyarakatan (RT, RW, Desa, Kelurahan, Kecamatan, Desa, Kelurahan, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	124 Dokumen	254 Dokumen	171,369,500.00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Peningkatan Kesegiatan masyarakat at yang berkeadilan dan 3) Meningkatkan andrian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	-	124 Dokumen	0.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
05	2.13.05.2.01.00	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa											
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	124 Dokumen	2 Dokumen	113,380,850.00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Peningkatan Kesegiatan masyarakat at yang berkeadilan dan 3) Meningkatkan andrian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	-	124 Dokumen	0.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
06	2.13.05.2.01.00	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna											

		Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemembi Desa dalam Pemantauan Teknologi Tepat Guna	16 Laporan		11 Laporan	115,248,690.00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Peningkatan kesejahteraan masyarakat at yang berkeadilan (suba3) Mengkatakan andrian Desa Dalam Mendukung Kenajalan Penbangunan Daerah	-	16 Laporan	0.00	DINAS PEMERDAKAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05.2.01.00.09		Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga												
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	139 Dokumen		12 Dokumen	687,317,550.00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Peningkatan kesejahteraan masyarakat at yang berkeadilan (suba3) Mengkatakan andrian Desa Dalam Mendukung Kenajalan Penbangunan Daerah	-	139 Dokumen	0.00	DINAS PEMERDAKAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
J U M L A H						12,861,302,211.00							0.00	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merencanakan 4 program, 11 kegiatan dan 39 sub kegiatan dengan pagu indikatif **Rp. 9.454.985.549,-** . Alokasi program dan kegiatan serta indikasi pendanaan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025

NO	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (N)		
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			9,454,985,549	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	3,787,838,609	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	100%	89,934,550	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok	42,299,700	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dok	3,522,450	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dok	3,653,750	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Lap	40,458,650	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100%	2,666,846,184	
	Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	17 orang	2,608,016,184	

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 Lap	58,830,000	
3		Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar	100%	27,697,000	
		Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Lap	27,697,000	
4		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	142,981,075	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		35 orang	20,000,000	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dok	14,999,875	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 orang	107,981,200	
5		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	478,400,800	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 paket	2,540,000	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	2,070,000	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang Disediakan	3 Paket	10,404,200	
		Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan penggandaan yang Disediakan	2 Paket	7,015,000	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dok	14,100,000	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11 Lap	23,640,000	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	196 Lap	418,631,600	
6		Pengadaan barang milik penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	100%	59,000,000	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Atau Mesin lainnya yang Disediakan	3 unit	59,000,000	
7		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	162,069,000	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 lap	4,845,000	

		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Lap	94,224,000	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Lap	63,000,000	
	8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100%	160,910,000	
		Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan perizinannya	16 unit	84,650,000	
		pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin Lainnya yang Dipelihara	42 unit	25,260,000	
		pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Rehabilitasi	3 unit	51,000,000	
II		Program Penataan Desa	Persentase Desa Yang Baik Penataan Wilayah Desanya	85%	46,544,500	
	9	Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Peningkatan Penataan Desa	80%	46,544,500	
		Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	1 Desa	46,544,500	
III		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan desa	85%	4,533,295,850	
	10	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Administrasi dan Keuangan Desa	100%	4,533,295,850	
		Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2 Dok	10,654,200	
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	125 Dok	297,594,550	
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	125 Dok	34,267,450	
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	125 Dok	68,205,750	
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur	124 orang	170,629,950	
		Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	125 Dok	23,734,900	
		Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	67 Lap	3,620,418,900	

		Facilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	15 lap	44,080,600	
		Facilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	11Lap	124,999,650	
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	124 orang	138,709,900	
IV		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase peningkatan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan lembaga masyarakat, lembaga ekonomi dan pemanfaatan teknologi tepat guna	80%	1,087,306,590	
	11	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemberdayaan lembaga masyarakat, lembaga ekonomi desa dalam pembangunan desa	100%	1,087,306,590	
		Facilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	254 Dok	171,359,500	
		Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan PAD	Jumlah Dokumen Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	2 Dok	113,380,850	
		Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	11 lap	115,248,690	
		Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	12 Dok	687,317,550	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program dan kegiatan dalam kurun waktu tahun 2025, sehingga upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat terarah dan terukur. Untuk itu diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mencapai keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi daerah diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi, berkelanjutan dan bersinergi dengan OPD yang membidangi fungsi lain dilingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Renja tahun 2025 adalah pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025. Kesiapan sumber daya manusia, pendanaan dan ketatalaksanaan serta komitmen dari pimpinan dan staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Renja ini. Keberhasilan pelaksanaan Renja juga akan sangat menentukan pencapaian target-target kinerja dalam Renstra 2021-2026.

Semoga Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.